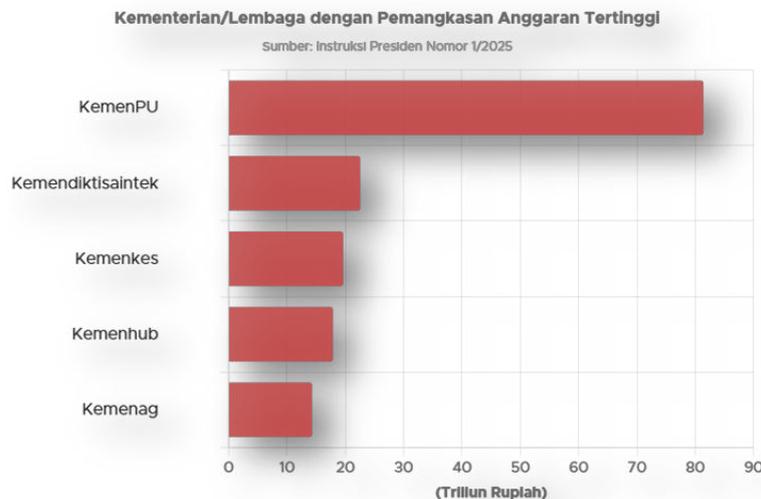


Efisiensi vs Kualitas: Tinjauan terhadap Kebijakan Pemangkasan Belanja Strategis di Sektor Pemerintahan

Target efisiensi anggaran sebesar Rp. 306,69 Triliun di awal tahun mulai menunjukkan dampaknya secara nyata di pertengahan tahun ini. Perlambatan ekonomi yang terasa sejak awal tahun, kini diperparah oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan di sektor pemerintah. Ketidakpastian ekonomi global dan nasional yang terus menguat turut menggoyahkan stabilitas sektor pemerintahan, yang sebelumnya sering dianggap sebagai sektor paling stabil dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Pagu anggaran yang sudah ditetapkan di awal tahun terpaksa mengalami bongkar pasang pasca keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Adapun gambaran Kementerian/Lembaga yang mengalami pemangkasan tertinggi adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/5-kementerianlembaga-paling-terdampak-efisiensi-anggaran-2025-IFxKt>

Keluarnya Inpres ini menekankan penghematan, dengan memangkas pos-pos yang dianggap “lemak” dalam struktur anggaran kegiatan belanja pemerintah seperti, perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan percetakan. Sayangnya, diantara pos-pos anggaran yang dipangkas, terdapat anggaran untuk kegiatan kajian, analisis dan pendidikan, pelatihan (diklat), yang sebenarnya memiliki peran strategis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Efisiensi yang dirancang tanpa perencanaan matang sering kali hanya dipahami sebagai pemangkasan anggaran, bukan sebagai upaya optimalisasi sumber daya.

Pendekatan efisiensi dalam Inpres ini justru bertolak belakang dengan prinsip efisiensi sektor publik yang seharusnya. Dalam manajemen sektor publik efisiensi adalah memaksimalkan *output* dan dampak dari penggunaan sumber daya yang tersedia. Efisiensi yang ideal seharusnya dipahami sebagai bentuk optimalisasi sumber daya yang ada agar dapat mencapai tujuan pembangunan, alih-alih hanya menyelamatkan kas negara dalam jangka pendek. Pemangkasan belanja terus-menerus dapat berdampak negatif terhadap berbagai sektor penting yang akan menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Contohnya penguatan kajian dan analisis dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam kebijakan publik dan pelayanan masyarakat sehingga seharusnya masuk dalam belanja

strategis bukan teknis. Demikian juga dengan pelatihan dan pendidikan ASN yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan agar mampu merespon tantangan zaman justru menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.

Dilema antara efisiensi birokrasi dan substansi pelayanan publik mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator yang paling mencolok. Proses pelayanan menjadi lebih lambat, jumlah layanan yang tersedia berkurang dan standar pelayanan mulai mengalami penurunan. Beberapa potensi kerugian dapat dilihat dan dihitung namun yang penting untuk diantisipasi adalah potensi kerugian yang tidak terlihat seperti demoralisasi ASN akibat keterbatasan fasilitas kerja. Beberapa saat lalu media sosial sempat diramaikan oleh keluhan mengenai suasana kantor pemerintahan yang gelap karena lampu dimatikan, ruangan panas karena AC dimatikan, serta pembatasan penggunaan air minum galon yang biasa menjadi fasilitas dasar di kantor pemerintahan. Hal-hal tersebut merupakan contoh nyata dari dampak kebijakan efisiensi yang tidak mempertimbangkan kondisi dilapangan dan tidak berbasis pada kajian yang komprehensif.

Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan berbasis bukti yang menekankan pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan data, analisis dan bukti agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif dalam jangka pendek tetapi juga berdampak positif secara berkelanjutan (Nutley *et al*, 2007). Dalam konteks inilah peran perencana dan analisis kebijakan menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berfokus pada output seperti jumlah kegiatan atau nominal anggaran tetapi juga pada dampak dan nilai tambah terhadap masyarakat. Menjadikan efisiensi sebagai tujuan utama, dapat mengorbankan kualitas pelayanan jika tidak diperhitungkan secara matang mengenai implikasinya.

Efisiensi bukanlah tujuan akhir namun merupakan “anak tangga” untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih lincah dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu mengedepankan efisiensi yang strategis yaitu efisiensi yang berorientasi jangka panjang, bukan sekedar efisiensi teknis yang bersifat operasional harian (Hughes, O.E, 2012). Efisiensi strategis berarti menimbang secara cermat kegiatan mana yang memberikan dampak besar terhadap masyarakat dan pembangunan nasional, serta merancang ulang anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Sebagai contoh, pemerintah bisa mengadopsi pendekatan *value for money* dalam setiap pengambilan keputusan anggaran dengan pendekatan ini, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki nilai atau manfaat yang jelas, terukur dan berdampak (OECD, 2010). Peran inovasi dan kolaborasi antar lembaga juga memegang kunci dalam meningkatkan pelayanan publik, dalam laporannya World Bank menekankan bahwa koordinasi yang sukses tidak hanya bergantung pada mekanisme formal tapi juga pada lingkungan institusional yang mendukung dan proses-proses yang mendorong kolaborasi (World Bank Group, 2020). Pendekatan ini memberikan dampak jangka panjang dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, penting juga untuk mengadopsi teknologi untuk mendukung efisiensi, digitalisasi layanan publik dapat mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Untuk melakukan digitalisasi secara optimal, tentu dibutuhkan investasi awal yang tidak sedikit maka efisiensi yang bijak harus disertai dengan strategi investasi jangka panjang. Efisiensi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak dan keberlanjutan akan menjadi bumerang bagi pemerintah, jika ASN kehilangan motivasi, jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pelayanan publik, maka semua penghematan itu tidak ada artinya. Pemerintah harus menyadari bahwa efisiensi bukan hanya soal memangkas anggaran tetapi soal bagaimana merancang kebijakan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih bermakna. Penghematan Rp. 306,69 Triliun hari ini bisa berbiaya lebih mahal di masa depan jika menggerus fondasi kapasitas birokrasi.

Pada akhirnya menakar efisiensi adalah menjaga kualitas. Efisiensi bukanlah pemangkasan semata tetapi proses menciptakan nilai lebih dari setiap anggaran yang dikeluarkan. Kebijakan efisiensi harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang strategis dan berbasis bukti jika pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pendekatan yang tepat efisiensi bukanlah ancaman melainkan jembatan menuju pemerintahan yang lebih baik, tangguh dan berdaya saing (Israini Miradina).

Referensi:

- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Hughes, O. E. (2012). *Public Management and Administration: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2010). *Value for Money in Government: Public Administration after "New Public Management"*. OECD Publishing.
- Nutley, S.M., Walter, I., & Davies, H.T.O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Policy Press
- World Bank Group. (2020). *Improving Public Sector Performance: Through Innovation and Inter-Agency Coordination*. Washington, DC: World Bank